PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA



2025

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA SAMARINDA

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dengan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan manifestasi akuntabilitas Pemerintah Kota Samarinda sebagai wujud dalam merealisasikan mandat pembangunan daerah. Melalui evaluasi yang objektif, LKPJ berfungsi sebagai komitmen Pemerintah Kota Samarinda atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi fundamen strategis bagi perencanaan pembangunan pada periode mendatang. Penyusunan dokumen LKPJ disusun berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Wali Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan wujud implementasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda pada tahun 2025 sebagai bentuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Samarinda. Realisasi APBD Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2025 dapat diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama serta indikator kinerja program yang berorientasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik. Evaluasi pada capaian target kinerja merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas Pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara sistematis, ruang lingkup LKPJ Wali Kota

Samarinda Tahun 2025 mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta capaian pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup capaian realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta implementasi kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang menyajikan hasil tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada hasil evaluasi tahun anggaran sebelumnya sebagai wujud sinergitas penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian pembangunan dan kemajuan daerah pada tahun 2025 merupakan manifestasi dari kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Samarinda, yang didukung penuh oleh kontribusi nyata seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat Kota Samarinda. Keberhasilan ini adalah cerminan dari komitmen bersama dalam memajukan daerah.

Pemerintah Kota Samarinda menyadari bahwa perjalanan pembangunan tidak terlepas dari berbagai kendala dan dinamika. Oleh karena itu, melalui komitmen yang kuat serta dukungan kolektif dari semua pihak, berbagai upaya strategis terus dilakukan secara maksimal untuk memastikan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Akhir kata, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda Tahun 2025 ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang komprehensif dan objektif atas realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Samarinda selama Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 16 Maret 2026
WALI KOTA SAMARINDA

ANDI HARUN

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN ..... BAB I - 1
1.1. Dasar Hukum ..... BAB I - 1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah ..... BAB I - 2
a. Visi ..... BAB I - 2
b. Misi ..... BAB I - 5
1.3. Data Umum Daerah ..... BAB I - 16
a. Data Geografis Wiliyah ..... BAB I - 16
b. Jumlah Penduduk ..... BAB I - 19
c. Pertumbuhan Penduduk ..... BAB I - 19
d. Jumlah PNS ..... BAB I - 21
e. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan ..... BAB I - 21
f. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja; dan ..... BAB I - 22
g. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan ..... BAB I - 23
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ..... BAB II - 1
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ..... BAB III - 1
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan ..... BAB III - 1
1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja ..... BAB III - 1
2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan ..... BAB III - 10
3. Analis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ..... BAB III - 311
3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan ..... BAB III - 437
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya ..... BAB III - 454
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN ..... BAB IV - 1
4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas – Pembantuan ..... BAB IV - 1
4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Pusat/Provinsi ..... BAB IV - 1
4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya ..... BAB IV - 3
4.2. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian ..... BAB IV - 3
BAB V PENUTUP ..... BAB V - 1
LAMPIRAN ..... LAMPIRAN - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda ..... BAB I - 17
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Samarinda Per-Kecamatan Tahun 2025 ..... BAB I - 19
Tabel 1. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Samarinda ..... BAB I - 20
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan ..... BAB I - 21
Tabel 1. 5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya ..... BAB I - 22
Tabel 1. 6 Realisasi Belanja Menurut Jenisnya ..... BAB I - 22
Tabel 1. 7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya ..... BAB I - 23
Tabel 2. 1 Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ..... BAB II - 1
Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja Wali Kota Samarinda Tahun 2025 periode RPJMD 2021 - 2026 ..... BAB III - 2
Tabel 3. 2 Perjanjian Kinerja Wali Kota Samarinda Tahun 2025 periode RPJMD 2025 - 2029 ..... BAB III - 4
Tabel 3. 3 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 ..... BAB III - 7
Tabel 3. 4 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2025 ..... BAB III - 12
Tabel 3. 5 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2025 ..... BAB III - 64
Tabel 3. 6 Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2025 ..... BAB III - 154
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Unsur Penunjang Tahun 2025 ..... BAB III - 183
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Unsur Kewilayahan Tahun 2025 ..... BAB III - 237
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 ..... BAB III - 303
Tabel 3. 10 Data Indeks RB Provinsi dan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2025 ..... BAB III - 340
Tabel 3. 11 Serapan Anggaran per Program Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2025 ..... BAB III - 351
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran ..... BAB III - 402
Tabel 3. 13 Data Nilai Evaluasi AKIP se Kalimantan Timur ..... BAB III - 414
Tabel 3. 14 Matriks Rekomendasi Perbaikan AKIP Pemerintah Kota Samarinda ..... BAB III - 421
Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran pada Program Pendukung ..... BAB III - 422
Tabel 3. 16 Serapan Anggaran pada Kegiatan yang mendukung IPP Kota Samarinda ..... BAB III - 435
Tabel 3. 17 Kebijakan Strategis Tahun 2025 ..... BAB III - 437
Tabel 3. 18 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 ..... BAB III - 454
Tabel 4. 1 Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan ..... BAB IV - 2
Tabel 4. 2 Permasalahan dan Upaya dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 ..... BAB IV - 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 ..... BAB III - 313
Gambar 3. 2 Pembangunan Ekonomi Inklusif ..... BAB III - 316
Gambar 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi ..... BAB III - 317
Gambar 3. 4 Pertumbuhan Ekonomi ..... BAB III - 318
Gambar 3. 5 PDRB per Kapita Tahun 2025 ..... BAB III - 321
Gambar 3. 6 Rasio Gini Kota Samarinda Tahun 2025 ..... BAB III - 323
Gambar 3. 7 Laporan Expose IKLI dan IKLH Kota Samarinda ..... BAB III - 330
Gambar 3. 8 Diagram Indeks Kota Layak Huni (IKLH) ..... BAB III - 331
Gambar 3. 9 Diagram Indeks Kota Layak Huni (IKLH) ..... BAB III - 332
Gambar 3. 10 Diagram Indeks Kota Layak Huni (IKLH) ..... BAB III - 335
Gambar 3. 11 Diagram Indeks Reformasi Birokrasi ..... BAB III - 336
Gambar 3. 12 Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi ..... BAB III - 338
Gambar 3. 13 Persentase Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi ..... BAB III - 339
Gambar 3. 14 Persentase Capaian Indikator Dampak dan Strategi Pembangunan ..... BAB III - 339
Gambar 3. 15 Tren UHH Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia ..... BAB III - 346
Gambar 3. 16 Data Realisasi Pendapatan Tahun 2025 ..... BAB III - 373
Gambar 3. 17 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur ..... BAB III - 406
Gambar 3. 18 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ..... BAB III - 408







PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA

BAB I

PENDAHULUAN

LKPJ Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 yang tertuang dalam Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959), dimana disebutkan bahwa Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai Ibu kotanya dan sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur;
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 tentang Pemerintahan Daerah, sebutan Kotapraja berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda;
e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839, sebutannya berubah kembali menjadi Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan bagian dari Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagai manifestasi cita-cita seluruh pemangku kepentingan daerah, visi dan misi pembangunan jangka menengah harus ditransformasikan secara konkret ke dalam sasaran dan arah kebijakan guna memastikan capaian kinerja yang efektif. Dalam menjalankan amanat pembangunan, Pemerintah Daerah menjadikan sasaran dan arah kebijakan sebagai acuan utama penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan rasional dengan memprioritaskan penyelesaian isu strategis yang relevan bagi kemajuan daerah. Sasaran kinerja dalam kurun waktu lima tahun diwujudkan melalui tahapan capaian tahunan yang sistematis dengan arah kebijakan sebagai kerangka agenda strategis yang menjadi fokus prioritas pembangunan daerah selamat satu periode kepemimpinan.

a. Visi

Berlandaskan pada kemajuan capaian pembangunan periode 2016-2021 dan analisis isu-isu strategis daerah, serta berpedoman pada visi dan misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Samarinda periode 2021-2026, Pemerintah Kota menetapkan periode 2025-2029 sebagai tahap awal pembangunan jangka panjang yang berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045. Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, Bapak Dr. H. Andi Harun dan Bapak H. Saefuddin Zuhri, SE.,MM, telah ditetapkan visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025–2029 adalah:

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

Visi **“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”** merepresentasikan harapan sekaligus arah pembangunan Kota Samarinda yang selaras dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh, di

mana kemajuan Kota Samarinda diharapkan mampu memberikan kontribusi strategis dan berkelanjutan bagi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Samarinda Maju mempunyai makna sebagai berikut:

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan masyarakat agar memiliki daya saing tinggi, adaptif terhadap dinamika pasar global, serta mampu memanfaatkan peluang kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

Kemajuan Ekonomi diwujudkan melalui penguatan peran Kota Samarinda sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong terciptanya peluang usaha, investasi, dan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pengembangan sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, industri, pariwisata, perikanan, dan pertanian yang berkelanjutan.

Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, meliputi pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, serta lingkungan hidup yang aman dan nyaman.

Peningkatan Infrastruktur diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang modern dan berkualitas, mencakup jaringan jalan, sistem transportasi, fasilitas umum, serta teknologi informasi guna memperkuat aksesibilitas, konektivitas, dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Kaltim Maju mempunyai makna sebagai berikut:

Pusat Pemerintahan dan Layanan Publik menegaskan peran Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif guna mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Kontribusi terhadap Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan posisi strategis Kota Samarinda sebagai motor penggerak pembangunan daerah, di mana setiap capaian kemajuan kota diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh.

Pembangunan Berkelanjutan dimaknai sebagai upaya mewujudkan kemajuan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

"MAJU" dalam konteks visi **"Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju"** yang terdiri dari singkatan **M-A-J-U** memiliki arti yang mendalam, yaitu sebagai acuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh Kota Samarinda. Berikut adalah penjelasan dari arti singkatan **M-A-J-U** tersebut:

Mandiri dimaknai sebagai kondisi Kota Samarinda yang mampu berdiri sendiri secara ekonomi, sosial, dan administrasi tanpa ketergantungan pada pihak luar dalam pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan, melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien serta penguatan kemandirian pada berbagai sektor strategis, termasuk ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Adil dimaknai sebagai pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda yang berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataan, tanpa menimbulkan kesenjangan antarwilayah, sektor, maupun kelompok masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, memperoleh akses yang setara terhadap kesempatan dan sumber daya serta merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Ber-Jaya mencerminkan harapan terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota yang berprestasi, unggul, dan memiliki daya saing tinggi, yang ditandai dengan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor strategis seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mampu

berperan penting di tingkat regional maupun nasional dengan reputasi yang baik dalam tata kelola dan capaian pembangunan.

Unggul dimaknai sebagai upaya mewujudkan Kota Samarinda yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam berbagai aspek, termasuk pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan ekonomi, sehingga mampu menjadi daerah yang berdaya tarik tinggi bagi investor, wisatawan, dan masyarakat, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif serta sistem pemerintahan yang efisien dan modern.

Dengan demikian, makna **Mandiri, Adil, Ber-Jaya, dan Unggul** mencerminkan cita-cita untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota yang mandiri dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah, adil dalam pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, berjaya melalui capaian dan prestasi di berbagai sektor, serta unggul dalam seluruh aspek pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.

b. Misi

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2025- 2029 sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing;**
2. **Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan;**
3. **Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;**
4. **Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis;**
5. **Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.**

Penjelasan dari masing-masing misi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing**

Misi ke-1 merupakan arah kebijakan strategis Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan keberhasilan pembangunan di seluruh sektor.

Sumber daya manusia yang unggul dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan, kompetensi, keterampilan, dan derajat kesehatan yang memadai, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam proses pembangunan. Upaya mewujudkan SDM **unggul** dilaksanakan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan pada seluruh jenjang, penguatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata, pengembangan kompetensi dan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta peningkatan literasi masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Pembangunan SDM juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas individu agar mampu berpikir kritis, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup.

Sumber daya manusia yang **berbudaya** mencerminkan masyarakat yang memiliki karakter kuat, menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kearifan lokal, serta mampu menjaga harmoni dalam keberagaman sosial dan budaya. Penguatan dimensi budaya diarahkan melalui pembangunan karakter, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta pengembangan sikap toleransi, saling menghargai, dan tanggung jawab sosial. SDM yang berbudaya diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban,

sekaligus memperkuat identitas Kota Samarinda di tengah dinamika perkembangan sosial dan modernisasi.

Sumber daya manusia yang berdaya saing diarahkan pada kemampuan masyarakat untuk bersaing dan beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Peningkatan daya saing SDM dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga kerja, pengembangan kreativitas dan inovasi, peningkatan produktivitas, serta penyiapan SDM yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. **Daya saing** SDM juga mencakup kemampuan kewirausahaan, penguasaan teknologi, serta etos kerja yang profesional dan berorientasi pada kinerja.

Melalui pelaksanaan misi ini, Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan kompeten, sehingga mampu menjadi subjek utama pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Samarinda.

2. **Misi 2 : Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan**

Misi ke-2 ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Perekonomian yang **inklusif** diarahkan untuk menjamin akses yang adil dan merata terhadap lapangan kerja, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang berusaha bagi seluruh warga tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu memiliki peluang yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pelaksanaan misi ini dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang beruntung, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal lainnya. Pemerintah daerah mendorong penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan akses terhadap permodalan, pendampingan usaha, dan perluasan jaringan pemasaran.

Selain itu, perekonomian yang **inklusif** juga diwujudkan melalui pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah dan antar sektor, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah pinggiran, guna mengurangi kesenjangan pertumbuhan dan meningkatkan konektivitas ekonomi daerah. Pendekatan ini bertujuan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat serta mampu mendorong terciptanya struktur ekonomi daerah yang lebih seimbang dan berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan **kemandirian** ekonomi daerah, Pemerintah Kota Samarinda mengarahkan pembangunan pada optimalisasi potensi dan keunggulan lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi regional dan nasional.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi daerah juga dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip **keberlanjutan**, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan sumber daya alam. Kebijakan ekonomi diarahkan agar mendukung pengembangan kegiatan usaha yang ramah lingkungan, efisien dalam pemanfaatan sumber daya, serta mampu

meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang di Kota Samarinda.

3. **Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan**

Misi ke-3 menegaskan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan daya saing dan pertumbuhan perekonomian daerah. Infrastruktur diposisikan sebagai prasarana strategis yang mendukung kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Infrastruktur yang **berkualitas** dimaknai sebagai penyediaan dan pengelolaan infrastruktur fisik maupun sosial yang memenuhi standar teknis, keamanan, kenyamanan, dan ketahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Infrastruktur fisik meliputi jalan, jembatan, bangunan publik, sistem transportasi, air bersih, sanitasi, energi, serta prasarana pendukung lainnya. Sementara itu, infrastruktur sosial mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat layanan masyarakat yang berfungsi untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi secara efisien, serta dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain memenuhi aspek teknis, kualitas infrastruktur juga mencakup perencanaan desain yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta didukung oleh sistem pemeliharaan yang **berkelanjutan** agar infrastruktur dapat berfungsi optimal dalam jangka

panjang. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan fisik semata, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan menjadi landasan utama dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan infrastruktur. Hal ini mencakup penggunaan material yang ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, serta upaya meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga tetap mampu mendukung kualitas hidup generasi yang akan datang.

Aspek keberlanjutan juga mencakup kesiapsiagaan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana alam. Pembangunan infrastruktur diarahkan agar memiliki ketahanan terhadap potensi bencana, seperti banjir dan kondisi lingkungan ekstrem, melalui penerapan teknologi yang tepat guna dan perencanaan yang terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, infrastruktur tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga adaptif dan tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemerintah daerah mendorong terwujudnya konektivitas yang baik antarwilayah di Kota Samarinda serta dengan daerah lain di Kalimantan Timur, guna mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat integrasi sosial dan ekonomi regional. Akses yang memadai terhadap transportasi, komunikasi, air bersih, listrik, dan sanitasi menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik mendukung kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, misi ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada pembangunan yang holistik, inklusif, dan berwawasan lingkungan demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. **Misi 4 : Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis**

Misi ke-4 menegaskan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Kota Samarinda yang layak huni, melalui penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBNAS), peningkatan ketahanan sosial budaya, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk menciptakan kondisi kota yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan secara berkelanjutan.

Kota yang **layak huni** dimaknai sebagai kota yang mampu menyediakan lingkungan hidup yang mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti ketersediaan hunian yang layak, akses terhadap fasilitas umum, pelayanan dasar yang memadai, serta lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, akses air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi bagian integral dalam upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Stabilitas kamtibmas menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kota yang layak huni. **Keamanan** dan **ketertiban masyarakat** yang terjaga akan menciptakan rasa aman dan tenteram bagi warga dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus mendukung iklim sosial dan ekonomi yang kondusif. Upaya menjaga stabilitas kamtibmas dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan, tindak kriminal, dan potensi konflik sosial. Pendekatan keamanan yang berbasis pada kepercayaan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan dalam menciptakan ketenteraman yang berkelanjutan.

Ketahanan sosial budaya diarahkan untuk membangun masyarakat yang tangguh, harmonis, dan berdaya dalam menghadapi dinamika sosial serta perubahan budaya. Penguatan ketahanan sosial budaya dilakukan melalui upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal, penghormatan terhadap keberagaman suku, agama, adat, dan tradisi, serta penguatan kohesi sosial antar kelompok masyarakat. Pembangunan sosial budaya juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan inklusivitas, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun dan berkeadilan. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam merespons perubahan sosial menjadi bagian penting untuk menjaga identitas budaya lokal di tengah perkembangan dan modernisasi kota.

Ketahanan ekologis merupakan aspek penting lainnya dalam mewujudkan Kota Samarinda yang layak huni. Ketahanan ekologis dimaknai sebagai kemampuan daerah dalam mengelola, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup serta sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, perlindungan ekosistem, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana alam, seperti banjir dan kebakaran lahan. Pembangunan daerah diarahkan agar selaras dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga tidak

menurunkan daya dukung lingkungan dan tetap menjamin kualitas hidup generasi yang akan datang.

Melalui pelaksanaan misi ini, Pemerintah Kota Samarinda berupaya mewujudkan pembangunan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan fokus pada.

1. Terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah kota.
2. Terbangunnya ketahanan sosial budaya yang kuat melalui penghormatan terhadap keberagaman dan penguatan hubungan sosial yang harmonis antarwarga; serta
3. terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penguatan mitigasi bencana.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan Kota Samarinda dapat berkembang sebagai kota yang layak huni, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

5. **Misi 5 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang integritas dan akuntabel.**

Misi ke-5 merupakan arah kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang inovatif, berketahanan, dan adaptif, dengan berlandaskan pada prinsip integritas dan akuntabilitas. Misi ini menempatkan penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang **inovatif** dilaksanakan melalui pembaruan sistem dan mekanisme kerja pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyederhanaan prosedur birokrasi guna meningkatkan

kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan publik. Inovasi pemerintahan diarahkan untuk mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta menghasilkan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat.

Ketahanan tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme dan kapasitas aparatur sipil negara, serta penataan sistem manajemen pemerintahan yang mampu menjamin keberlangsungan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dalam berbagai kondisi. Pemerintahan daerah dituntut memiliki kemampuan untuk menghadapi dinamika perubahan, risiko pembangunan, serta potensi krisis secara terencana dan terukur.

Tata kelola pemerintahan yang **adaptif** dilaksanakan melalui kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan, program, dan tata kerja terhadap perkembangan lingkungan strategis, perubahan regulasi, kemajuan teknologi, serta aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Adaptivitas pemerintahan menjadi prasyarat untuk menjaga relevansi kebijakan daerah dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Integritas dan **akuntabilitas** menjadi prinsip dasar yang melekat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Integritas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan etika pemerintahan, serta penguatan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Akuntabilitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja serta keuangan daerah yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan pelaksanaan misi ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, bersih, responsif, dan berorientasi

pada kinerja, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan di Kota Samarinda.